



# Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta

Rahma Syakira Ayu<sup>1</sup>, Ananda Dewi<sup>2</sup>, Nayla Febrina<sup>3</sup>, Fatkhuri<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

**Abstrak :** Penelitian ini menganalisis peran pemerintah Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dalam mengatasi kesenjangan Pendidikan yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam akses dan kualitas Pendidikan antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, serta distribusi infrastruktur, dan kualitas tenaga pengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah, dan program pelatihan guru, serta mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap pemerataan pendidikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan dengan kualitatif deskriptif dengan studi literature dari buku, jurnal ilmiah dan artikel. Analisis penelitian ini dilakukan dengan Teori Keadilan Sosial oleh Rawls dan Teori Implementasi Kebijakan oleh Wildavsky dan Lipsky. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun kebijakan KJP dan BOS Daerah telah meningkatkan akses Pendidikan bagi kelompok rentan, tetapi implementasi di lapangan menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian data penerima, penyalahgunaan dana, dan distribusi sumber daya yang belum optimal. Program pelatihan guru juga terbukti efektif meningkatkan kualitas pengajar, meskipun masih terkendala keterbatasan waktu dan jangkauan pelatihan. Kesenjangan Pendidikan di Jakarta juga berdampak psikologis pada siswa, seperti rasa rendah diri dan stress, yang dapat memperburuk siklus kemiskinan. Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme pendataan, memperluas jangkauan penelitian, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya Pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang berfokus pada kelompok rentan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam sector Pendidikan di Jakarta.

**Kata Kunci :** Kesenjangan, Pemerintah, Pendidikan.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2001>

\*Correspondence: Rahma Syakira Ayu

Email:

[2310413006@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310413006@mahasiswa.upnvj.ac.id)

Received: 24-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Published: 24-12-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study analyzes the role of the Jakarta Special Region (DKJ) government in addressing the education gap that reflects significant differences in access and quality of education between urban and suburban areas. This gap is influenced by socio-economic factors, as well as infrastructure distribution, and the quality of teaching staff. This study aims to evaluate policies such as the Jakarta Smart Card (KJP), Regional School Operational Assistance (BOS), and teacher training programs, and to identify the impact of these policies on education equity. The method used is a qualitative descriptive approach with literature studies from books, scientific journals and articles. The analysis of this study was carried out with the Theory of Social Justice by Rawls and the Theory of Policy Implementation by Wildavsky and Lipsky. The results of this study are that although the KJP and BOS Regional policies have increased access to education for vulnerable groups, implementation in the field faces challenges such as inconsistencies in recipient data, misuse of funds, and suboptimal distribution of resources. Teacher training programs have also proven effective in improving the quality of teachers, although they are still constrained by limited time and scope of training. The education gap in Jakarta also has a psychological impact on students, such as feelings of inferiority and stress, which can worsen the cycle of poverty. The government needs to improve data collection mechanisms, expand research reach, and optimize the allocation of education resources. This study emphasizes the importance of a policy approach that focuses on vulnerable groups to realize social justice in the education sector in Jakarta.

**Keywords:** Inequality, Government, Education.

## Pendahuluan

DKJ (Daerah Khusus Jakarta) merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan dinamika sosial, ekonomi, dan pendidikan yang kompleks, seperti terjadinya kesenjangan pendidikan di DKJ ini sendiri. Lalu, kesenjangan pendidikan di Jakarta juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti perbedaan akses antara perkotaan dan pinggiran kota, serta faktor ekonomi dan sosial. Hal ini menciptakan kompleksitas yang menarik untuk dianalisis, dan karena tentunya pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial. Maka dengan memahami peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan pendidikan dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Susanto & Pangesti, Fenomena peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di DKJ (Daerah Khusus Jakarta) dapat dilihat dari beberapa aspek penting yaitu Pemerintah DKJ (Daerah Khusus Jakarta) telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan, seperti program beasiswa bagi siswa kurang mampu seperti KJP (Kartu Jakarta Pintar), pembangunan sekolah baru di daerah terpencil, dan peningkatan fasilitas pendidikan, (Susanto & Pangesti, 2019). Pemerintah juga berfokus pada pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru untuk meningkatkan kualitas, seperti program sertifikasi guru. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun tantangan seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi sumber daya, dan infrastruktur pendidikan yang belum memadai masih menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Secara keseluruhan menurut Anwar, meskipun pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di DKJ (Daerah Khusus Jakarta), tantangan yang kompleks dan beragam masih memerlukan perhatian dan inovasi berkelanjutan untuk mencapai hasil pengajaran yang lebih baik, (Anwar, 2022)

Penelitian terdahulu tentang peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di DKJ (Daerah Khusus Jakarta) telah menunjukkan beberapa temuan menarik. Salah satu studi menyoroiti bagaimana kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, termasuk DKJ (Daerah Khusus Jakarta) Jakarta, masih cukup besar. Hal ini tercermin dalam ketidaksetaraan infrastruktur pendidikan dan akses terhadap fasilitas pendidikan yang lebih baik di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Data menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih rendah di wilayah-wilayah tertentu berkontribusi pada kemiskinan yang lebih tinggi, yang merupakan masalah signifikan di Jakarta, hasil penelitian dari (Rahman, n.d.) menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat diatasi dengan memberikan akses terhadap pendidikan berkualitas kepada setiap orang tanpa kecuali dan memberdayakan mereka melalui Pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keterampilan. Jadi, kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan berdampak pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sedangkan penelitian lain (Bagonza & Itaaga, 2022) menghasilkan, bahwa para pihak kepentingan di sektor pendidikan perlu memberikan insentif terhadap akses terhadap pendidikan di semua tingkat pendidikan jika pendidikan ingin digunakan sebagai alat yang efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah

untuk mengurangi ketidaksetaraan, kebijakan yang ada, terutama sistem hukou dan alokasi anggaran yang tidak memadai, justru memperparah kesenjangan sosial antara masyarakat pedesaan dan perkotaan.

Lalu hasil penelitian dari (Amelia, 2019), menjelaskan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan komitmen dari Pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya terhadap bidang pendidikan. Masalah dalam manajemen, birokrasi, dan seringnya pergantian kurikulum menciptakan konsistensi dan menambah beban biaya pada siswa serta orang tua. Kesenjangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan juga menjadi masalah, terutama terkait fasilitas dan kualitas guru. Penulis berharap adanya perubahan kepemimpinan dapat mendorong reformasi pendidikan, terutama dalam pemerataan sarana prasarana, peningkatan kualitas guru, dan penyederhanaan kurikulum. Sedangkan penelitian (Juventia & Yuan, 2024) membahas bahwa ketimpangan pendidikan merujuk pada perbedaan antara harapan atau standar ideal pendidikan dengan kenyataan yang terjadi. Hak atas pendidikan juga merupakan kunci untuk membentuk dan mengembangkan individu menuju arah yang lebih baik, adil, dan merata. Penelitian ini juga menunjukkan perbedaan kualitas pendidikan antara perkotaan dan daerah terpencil, yang mengalami kekurangan fasilitas, guru berkualitas, dan sarana pendidikan. Faktor penyebab ketimpangan termasuk buruknya infrastruktur, tingginya biaya pendidikan, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Dampak dari ketimpangan ini mencakup meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya daya saing. Penulis menyarankan peran pemerintah yang lebih aktif dalam pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pendidikan. Terdapat gap dari penelitian-penelitian tersebut seperti, Mengeksplorasi dampak psikologis yang dialami siswa akibat kesenjangan pendidikan, seperti rasa rendah diri, motivasi belajar yang rendah, hingga peningkatan angka putus sekolah. Studi ini dapat mencakup dampak dari kurangnya fasilitas, terbatasnya tenaga pendidik, dan ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan berkualitas. Hal tersebut dapat dijadikan materi untuk penelitian selanjutnya.

Fokus utama penelitian selanjutnya untuk memenuhi gap dari penelitian sebelumnya dengan menganalisis kebijakan pendidikan spesifik yang akan memberikan pemahaman baru tentang strategi pendidikan khusus yang berhasil mengatasi ketimpangan. Penelitian ini dapat membantu dalam pembuatan kebijakan publik, khususnya yang berfokus pada distribusi sumber daya pendidikan yang adil dengan melihat program beasiswa dan subsidi yang ada. Dan peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar, karena analisis tentang peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar dapat memberikan pemahaman baru dengan metode top-down dan bottom-up dalam penerapan kebijakan pendidikan. Ini akan menambah kontribusi pada penelitian ilmu politik tentang bagaimana metode kebijakan yang melibatkan partisipasi lokal, seperti partisipasi guru dan komunitas, dapat meningkatkan efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Kedua topik ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana peran pemerintah dapat berperan dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dan memperbaiki kualitas

pendidikan secara menyeluruh. Dengan mengeksplorasi kebijakan beasiswa dan subsidi pendidikan, kita dapat mengetahui kebijakan mana yang efektif untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Di sisi lain, memahami kualitas guru, serta sekolah memungkinkan pemerintah untuk merancang intervensi yang lebih komprehensif. Lalu, penelitian tentang peran pemerintah di DKI dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar akan memberikan wawasan baru mengenai bagaimana kota ini dapat memastikan bahwa semua siswanya mendapatkan akses ke pendidikan yang layak.

Artikel ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana efektivitas kebijakan beasiswa dan subsidi pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah DKI (Daerah Khusus Jakarta) Jakarta dalam mengurangi kesenjangan sosial di bidang pendidikan, Apa dampak psikologis dari kesenjangan pendidikan terhadap siswa di DKI (Daerah Khusus Jakarta) Jakarta, dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat mengatasi dampak tersebut, dan Bagaimana kebijakan pemerintah DKI (Daerah Khusus Jakarta) Jakarta dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar berdampak pada pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Jakarta, termasuk daerah pinggiran?. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk melihat peran dari pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

## **Teori**

### *1. Teori Keadilan Sosial*

Teori ini dikemukakan oleh John Rawls, ia membahas bahwa berpusat pada prinsip keadilan, yang seharusnya mengatur bagaimana sumber daya didistribusikan antara masyarakat. Menurut Amadi, dalam bukunya yang terkenal "A Theory of Justice" (1971) Rawls mendefinisikan keadilan sebagai keadilan distributif, yang berarti bahwa sumber daya, hak, dan kesempatan harus didistribusikan secara adil, terutama untuk orang-orang yang tidak memiliki kesempatan yang sama, (Amadi, 2012). Rawls berpendapat bahwa keadilan harus dianggap adil. Konsep keadilan menekankan bahwa setiap anggota masyarakat harus dilayani dengan adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Menurut Freeman, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan dalam hak-hak hukum dan akses ke sumber daya, (Freeman, 2003). Menurut Faiz, Rawls menyarankan dua prinsip utama tentang keadilan: 1. Prinsip Kebebasan yang Setara, Semua orang memiliki hak yang sama atas sistem kebebasan yang paling dasar yang sesuai dengan sistem kebebasan yang setara bagi semua orang. 2. Prinsip Perbedaan, Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga: a) Menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat (prinsip perbedaan) dan b) Terkait dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil, (Faiz, 2009).

Jadi dalam konteks pendidikan, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis fenomena sistem pendidikan memberikan kesempatan yang setara kepada semua orang, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rendah. Prinsip perbedaan Rawls dapat digunakan untuk mendukung kebijakan yang memberikan bantuan yang lebih besar kepada siswa yang berasal dari latar belakang

sosial-ekonomi kurang beruntung dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih setara kepada semua siswa. Kesimpulannya Teori Keadilan Sosial Rawls menekankan betapa pentingnya memberikan perlindungan dan distribusi yang adil kepada kelompok yang paling rentan. Dengan mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan perbedaan, Rawls menawarkan kerangka kerja untuk membangun masyarakat yang lebih adil di mana sumber daya dan kesempatan didistribusikan sedemikian rupa sehingga setiap orang, termasuk mereka yang kurang beruntung, memiliki kesempatan yang sama.

## 2. *Teori Implementasi Kebijakan*

Teori ini dikemukakan oleh Aaron Wildavsky dan Michael Lipsky, Aaron Wildavsky dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam studi implementasi kebijakan karena mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang dikenal sebagai pendekatan "bottom-up". Dan Konsep Michael Lipsky tentang "birokrasi tingkat jalanan", atau birokrasi tingkat jalanan, sangat dikenal. teori ini berfokus pada bagaimana kebijakan publik ditetapkan dan diterapkan di lapangan. Teori ini menekankan proses, masalah, dan dinamika yang terjadi antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Menurut Tummers & Bekkers, Teori ini membahas mengenai Discretionary Implementation yaitu, Penekanan pada peran pejabat implementasi, seperti pelaksana kebijakan dan birokrat, dalam menginterpretasikan dan menyesuaikan kebijakan dengan keadaan lokal, (Tummers & Bekkers, 2014) Menurut Hupe & Hill, pendekatan top-down, yang lebih terpusat, dan pendekatan bottom-up, yang lebih desentralisasi dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, (Hupe & Hill, 2007). Serta gagasan yang diusulkan oleh Michael Lipsky mengenai pejabat garis depan, termasuk guru, dosen, dan administrasi sekolah, yang memiliki otoritas untuk menyesuaikan kebijakan dengan keadaan di lapangan.

Karena dalam fenomena yang ada, terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas antara sekolah-sekolah di daerah pinggiran atau kurang berkembang, terutama dalam hal fasilitas, kualitas guru, dan ketersediaan sumber daya pendidikan. Teori ini dapat digunakan untuk memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah di sektor pendidikan dilaksanakan di Jakarta dan bagaimana hal itu berdampak pada kesenjangan pendidikan. Dengan melihat bagaimana kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah diterapkan di lapangan, termasuk masalah yang muncul selama proses pelaksanaannya. Dengan melihat bagaimana pejabat garis depan, seperti kepala sekolah, guru, dan administrasi sekolah, mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka mengatasi tantangan. evaluasi apakah kebijakan pendidikan di Jakarta menggunakan pendekatan top-down atau bottom-up, dan seberapa efektif keduanya dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Serta melihat bagaimana fleksibilitas kebijakan pendidikan diubah untuk memenuhi kebutuhan khusus kota Jakarta dan bagaimana fleksibilitas ini mempengaruhi hasil kebijakan.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena sosial yang berkaitan dengan kesenjangan pendidikan di DKJ (Daerah Khusus Jakarta) Jakarta. Setting penelitian ini adalah sektor pendidikan di DKJ (Daerah Khusus Jakarta), mengingat kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial yang tinggi di kota Jakarta, yang berdampak pada akses pendidikan dan kualitasnya. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan data sekunder yaitu studi literatur, yang dimana data diperoleh dari buku, jurnal, serta artikel yang relevan untuk memenuhi informasi terkait dengan topik penelitian ini, yaitu peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan di Jakarta. Menurut Habsy, studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan dengan subjek penelitian, (Habsy, 2017). Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menganalisis dari teori-teori yang relevan dengan topik ini, seperti Teori Keadilan Sosial dari John Rawls dan Teori Implementasi Kebijakan dari Aaron Wildavsky dan Michael Lipsky, untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kondisi Pendidikan di Daerah Khusus Jakarta

Menurut Sembiring, C. et al, Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan maupun secara langsung melalui pelatihan orang miskin dengan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, (Sembiring et al., 2023). Secara keseluruhan, pendidikan merupakan instrumen yang sangat berguna untuk mengurangi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan tidak hanya memperbaiki keadaan ekonomi seseorang, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, terutama untuk orang-orang yang miskin, sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di masa depan, seperti dalam teori keadilan sosial John Rawls yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua dilakukan secara adil termasuk pendidikan. Yang dimana pendidikan di Jakarta harus menekankan teori tersebut, bahwa semua individu harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Namun, kondisi pendidikan di Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang khas dari "ibukota" Indonesia. Banyak masalah terkait dengan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan. Dengan posisi strategisnya sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial, Jakarta seharusnya mendukung pendidikan berkualitas tinggi. Namun, ada perbedaan sosial dan ekonomi yang signifikan yang mempengaruhi kondisi pendidikan.

Menurut Saprianto, R. et al, Jakarta memiliki peluang dan tantangan yang berbeda untuk pengembangan pendidikan sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, (Saprianto et al., 2023). Jakarta memiliki dua sisi, ada banyak sumber daya dan dukungan dari sektor publik dan swasta yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi kota ini juga menghadapi masalah seperti ketimpangan sosial-ekonomi. Kepadatan

penduduk, dan kebutuhan akan pendidikan yang kompetitif dan berkualitas tinggi, salah satunya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membangun sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan siap untuk adaptasi terhadap perubahan dunia. Akibatnya, pendidikan di Jakarta tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah lain di Indonesia di masa depan.

Menurut Sirait, J.E. & Leorince, L, masalah seperti ekonomi di Jakarta pastinya banyak terjadi di daerah Jakarta pinggiran, banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga mereka tidak memiliki akses yang cukup ke pendidikan yang baik, (Sirait & Leorince, 2024) Akibatnya, anak-anak yang berasal dari keluarga yang miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka atau bahkan harus putus sekolah untuk membantu membiayai keuangan keluarga mereka. Menurut Edo, A. & Yasin, M, siswa yang berasal dari keluarga miskin seringkali memiliki pencapaian akademik yang lebih rendah dan memiliki akses yang lebih terbatas ke peluang pendidikan lanjutan, yang memperkuat siklus kemiskinan antar generasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya, (Edo & Yasin, 2024).

Dalam sekolah negeri khususnya, pemerintah menerapkan sistem Kebijakan yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim dari Kemendikbud sebelumnya, mengenai sistem zonasi di Indonesia, menambah kuota sekolah, menciptakan ketidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu, ketidakseimbangan antara sekolah favorit dan non-favorit, dan sarana dan prasarana yang tidak merata. Kuota zonasi 70% harus memenuhi tiga kriteria. Menurut Nanggala, A, jalur zonasi memiliki kuota maksimal 50%; jalur afirmasi untuk pemilik Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Jakarta Pintar memiliki 15%; jalur perpindahan orang tua memiliki 5%; dan jalur prestasi memiliki kuota sisa 30%. Pembaruan ini dimaksudkan untuk mencapai kesetaraan di bidang pendidikan, terutama dengan menghidupkan kembali persaingan yang sehat melalui jalur prestasi, (Nanggala, 2020). Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan pemerataan pendidikan. Namun, sistem zonasi pendidikan di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketidakmerataan sumber daya dan prasarana, yang menyebabkan perbedaan antara sekolah yang disukai dan yang tidak disukai, informasi yang tidak jelas, dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, jumlah sekolah di beberapa daerah tidak sebanding dengan jumlah orang yang tinggal di sana. Karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengubah sistem zonasi melalui kebijakan Kemendikbud yang meningkatkan kuota jalur prestasi menjadi 30% dan menurunkannya menjadi minimal 70%.

Namun, pada kenyataannya juga masih banyak terjadi ketimpangan dalam jalur zonasi, walaupun sudah dibatasi dan diatur dalam jarak tempuh dari tempat tinggal dan sekolahnya, masih banyak oknum yang memindahkan atau memalsukan data kartu keluarga (KK) agar bisa masuk kedalam jalur zonasi tersebut. Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), pada 20 Juni 2024, organisasinya menerima 162 laporan masalah PPDB 2024. Salah satu contohnya adalah manipulasi Kartu Keluarga pada jalur zonasi sebesar 21%. Selain itu, ada ketidaksesuaian

antara jumlah sekolah dan kepadatan penduduk di beberapa wilayah, yang menyebabkan persaingan dan membatasi pilihan pendidikan bagi siswa di daerah padat. Sistem zonasi menghadapi praktik KKN, karena beberapa pihak menggunakan jalur belakang untuk mendapatkan akses ke sekolah favorit. Sebaliknya menurut Martono, N. et al, sekolah yang tidak disukai sering dihindari, terutama oleh orang-orang dengan pendapatan menengah atas, karena budaya masyarakat yang menganggap sekolah favorit sebagai pilihan terbaik memperparah perbedaan ini, (Martono et al., 2018). Seperti dalam teori implementasi kebijakan oleh Wildavsky dan Lipsky yang menekankan pentingnya memahami proses penerapan kebijakan di lapangan, seperti dalam konsep teorinya yaitu pendekatan Top-Down yang dimana pemerintah cenderung membuat kebijakan pendidikan dengan pendekatan yang terpusat dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, seperti melalui sistem zonasi dan peningkatan anggaran untuk sekolah-sekolah negeri. Namun, seperti pada kenyataannya tetap saja kebijakan ini sering tidak sesuai dengan kondisi lapangan di Jakarta yang sangat beragam. Seperti, sistem zonasi yang dilakukan tidak mempertimbangkan perbedaan infrastruktur dan kondisi sosial dan ekonomi antara pusat kota dan daerah pinggiran yang mengakibatkan ketidakadilan antara sekolah favorit dan non-favorit.

## 2. Dampak Kesenjangan Pendidikan

Kesenjangan pendidikan di Jakarta, sebagai daerah khusus Jakarta, mencerminkan perbedaan yang signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Meskipun Jakarta memiliki infrastruktur pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, kesenjangan ini tetap ada, terutama dalam hal aksesibilitas dan dampak psikologis. Dampak kesenjangan pendidikan di Jakarta dari segi aksesibilitas adalah terdapat banyak sekolah dengan fasilitas modern, akses ke pendidikan berkualitas masih menjadi masalah bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Banyak dari mereka yang tinggal di daerah pinggiran atau kumuh yang tidak memiliki akses mudah ke sekolah-sekolah yang baik. Sementara itu menurut Anwar, M. S, di daerah pedesaan di sekitar Jakarta, fasilitas pendidikan seringkali sangat terbatas, dengan banyak sekolah yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, (Anwar, 2022). Kesenjangan pendidikan di Jakarta, memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi individu dan masyarakat. Dampak psikologis yang dapat terjadi adalah rasa ketidakadilan dan frustrasi karena anak-anak dari latar belakang kurang mampu sering merasakan ketidakadilan ketika mereka melihat teman-teman mereka di lingkungan yang lebih beruntung mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Hal ini bisa menimbulkan rasa frustrasi dan putus asa, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Akibat frustrasi dan ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan berkualitas dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Menurut Yuan, D. J. S. A, anak-anak dan remaja yang merasakan tekanan dari situasi pendidikan yang tidak adil mungkin mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan, (Yuan, n.d.).

Selain itu juga terdapat dampak bagi perekonomian negara sendiri, karena siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tidak memiliki akses ke pendidikan

berkualitas tinggi sering kali mengalami keterbatasan dalam pengembangan kemampuan dan keterampilan mereka secara individu. Menurut Andari, I.A.M.Y. et al, hal ini menghalangi mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya memperkuat siklus kemiskinan dan mengurangi peluang mobilitas sosial, (Andari et al., 2023). Secara sosial, kesenjangan pendidikan juga menyebabkan perbedaan kelas yang mencolok, yang semakin menonjolkan perbedaan antara mereka yang memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan mereka yang terpinggirkan. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan kesempatan, yang menimbulkan ketegangan sosial dan membuat orang merasa tidak adil. Selain itu menurut Fadhlurrahman, M.N. & Alfiansyah, S, kesenjangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Jakarta secara keseluruhan karena beberapa orang tidak memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka, sehingga kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan tidak merata, (Fadhlurrahman & Alfiansyah, 2024) Jika pemerintah tidak dapat mengatasi ketimpangan pendidikan di Jakarta, konsekuensi akan sangat luas dan berdampak negatif pada berbagai bagian masyarakat dan ekonomi. Menurut Susianita, R.A. & Riani, L.P, pertama dan terpenting, generasi muda yang tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas, yang akan menghalangi mereka dari berkompetisi di pasar kerja, (Susianita & Riani, 2024). Ini memperparah siklus kemiskinan karena orang-orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka.



**Gambar 1.** Data Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Sumber : (Abrar, 2023)

Seperti gambar diatas yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri yang cukup tinggi persentasenya, dengan masalah ketimpangan pendidikan ini menjadi masalah serius yang semakin memperburuk tingkat kemiskinan di negara ini sendiri. Karena akses yang terbatas terhadap pendidikan berkualitas tinggi seperti yang sudah dijelaskan diatas, menghalangi banyak orang untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak, menurunkan produktivitas tenaga kerja, dan membentuk lingkaran kemiskinan antar generasi, ketimpangan pendidikan di ibu kota Jakarta memperburuk kemiskinan.

Mereka yang tidak memiliki pendidikan yang cukup cenderung mendapatkan pekerjaan informal dengan gaji yang rendah, sementara mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar di sektor formal. Kondisi ini meningkatkan ketimpangan ekonomi dan mengurangi daya saing Jakarta baik di tingkat nasional maupun internasional. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga miskin yang merasa tertinggal dapat mengalami dampak psikologis yang dapat melemahkan semangat mereka dan memperparah ketimpangan. Agar efek buruk ini diatasi dan kemiskinan dikurangi, pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menyediakan pendidikan yang merata, mulai dari beasiswa hingga peningkatan kualitas guru.

### 3. Kebijakan Pemerintah

Kesenjangan pendidikan di DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia, menjadi tantangan serius yang perlu diatasi agar seluruh anak usia sekolah di wilayah ini mendapatkan hak pendidikan yang setara. Kesenjangan ini muncul akibat perbedaan kondisi sosial ekonomi yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan dalam akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak, kualitas pengajaran, dan kesempatan belajar yang optimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya secara konsisten untuk mengurangi ketimpangan ini melalui serangkaian kebijakan dan program yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan wilayah yang masih tertinggal. Kebijakan ini melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari dukungan finansial bagi siswa, penyediaan anggaran operasional sekolah tambahan, hingga program kolaborasi lintas sektor. Adapun beberapa kebijakan yang pemerintah berikan yaitu, Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah kebijakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditujukan untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini memberikan bantuan langsung tunai yang digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan seperti uang sekolah, pembelian buku, seragam, alat tulis, dan kebutuhan dasar lainnya. KJP didesain untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan bahwa siswa dari berbagai latar belakang ekonomi dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Menurut Nurdin, A, efektivitas program ini tercermin dalam peningkatan akses pendidikan dan pengurangan hambatan finansial bagi siswa dari keluarga tidak mampu, sehingga dapat berkontribusi pada pemerataan kesempatan pendidikan, (Nurdin, 2019).

Selain kebijakan KJP Plus ada juga kebijakan tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah, selain dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional, DKI Jakarta juga memiliki BOS Daerah, yang merupakan anggaran tambahan bagi sekolah-sekolah di wilayah dengan ketimpangan ekonomi yang signifikan. BOS Daerah berfungsi untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah, seperti perawatan fasilitas, penyediaan alat belajar, dan biaya program ekstrakurikuler. Keberadaan BOS Daerah memungkinkan sekolah-sekolah di area kurang berkembang untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang setara dengan sekolah di wilayah yang lebih maju. Menurut Rahayuningsih, S, dampaknya adalah terciptanya lingkungan belajar yang lebih memadai bagi semua siswa tanpa

menghiraukan latar belakang sosial ekonomi mereka, (Rahayuningsih, 2021). Dari kedua kebijakan tersebut lebih berfokus untuk siswa/siswi, ada salah satu kebijakan yang diberikan juga kepada semua guru yaitu kebijakan Program Pelatihan Guru dan Pengembangan Kurikulum, kebijakan ini untuk meningkatkan kualitas pengajaran di Jakarta, pemerintah mengadakan program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga pendidik. Program ini mencakup pelatihan metode pengajaran yang lebih inklusif, penerapan teknologi dalam pembelajaran, serta pengembangan kurikulum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa. Menurut Abdullah, A. A, Program ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pinggiran, sehingga siswa di berbagai kawasan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang merata, (Abdullah et al., 2023).

Untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di DKI Jakarta, pemerintah daerah telah menginisiasi berbagai kebijakan strategis yang bertujuan meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Kebijakan-kebijakan ini berfokus pada dukungan finansial langsung, peningkatan kualitas fasilitas sekolah, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan kapasitas tenaga pendidik. Setiap kebijakan ini diimplementasikan dengan mekanisme yang berbeda, menargetkan aspek-aspek khusus dari ketimpangan pendidikan di Jakarta. Berikut ini adalah penjelasan mengenai implementasi dan efektivitas dari masing-masing kebijakan yang telah dijalankan, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Dalam mengimplementasikan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dilakukan melalui pendataan siswa dari keluarga yang kurang mampu, yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Setelah verifikasi, penerima KJP mendapatkan kartu yang berfungsi sebagai alat transaksi elektronik untuk pembiayaan kebutuhan pendidikan. Dana bantuan ini disalurkan secara berkala dan hanya dapat digunakan untuk pembelian barang dan jasa terkait pendidikan. Sejauh ini Program KJP terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah di kalangan siswa dari keluarga kurang mampu. Namun, masih terdapat tantangan berupa penyalahgunaan dana KJP oleh sebagian penerima dan masalah administrasi terkait pendataan yang kadang kurang tepat sasaran. Selain itu menurut Muluk, A. P, peningkatan sosialisasi mengenai penggunaan dana secara benar diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program ini lebih lanjut, (Muluk et al., 2019). Ini relevan dengan konsep yang dikemukakan oleh Wildavsky yang mengusulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana para pelaksana kebijakan. Dalam program KJP ini pelaksana di lapangan seperti pihak sekolah dan Dinas pendidikan bertanggung jawab dalam hal mendata siswa-siswa yang berhak menerima bantuan dan memastikan bahwa dana bantuan digunakan untuk kebutuhan pendidikan. Namun, dalam kenyataan yang terjadi di lapangan seperti ketidakakuratan pendataan dan penyalahgunaan dana ini menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas pelaksana di lapangan agar kebijakan ini dapat mencapai tujuannya.

Selanjutnya dalam mengimplementasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah dimulai dengan penyaluran anggaran dari pemerintah daerah ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar. Dana ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari perawatan fasilitas hingga penyediaan materi ajar dan aktivitas ekstrakurikuler. Setiap sekolah harus membuat laporan penggunaan dana BOS, yang kemudian dievaluasi oleh pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sejauh ini BOS Daerah cukup efektif dalam memperkecil kesenjangan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Jakarta yang ekonominya kurang berkembang. Tantangan dalam implementasinya termasuk keterbatasan kapasitas manajemen dana di beberapa sekolah, sehingga seringkali dana tidak dimanfaatkan secara optimal. Menurut Ngaba, A. L., meningkatkan pelatihan manajemen dana bagi pihak sekolah menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas BOS Daerah, (Ngaba, 2017). Hal ini sama dengan konsep perbedaan menurut John Rawls yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika kebijakan tersebut menguntungkan kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam hal ini, kebijakan Dana BOS berupaya mengalokasikan dana tambahan bagi sekolah-sekolah di wilayah yang kurang berkembang, karena melalui distribusi dana tambahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di sekolah-sekolah tersebut, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih setara dengan sekolah di wilayah perkotaan yang lebih maju. Kebijakan ini tentunya relevan dengan konsep perbedaan menurut Rawls karena mengarahkan sumber daya tambahan kepada sekolah-sekolah yang berada dalam posisi kurang menguntungkan, untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan.

Selanjutnya mengimplementasi kebijakan Program Pelatihan Guru dan Pengembangan Kurikulum, program pelatihan guru dan pengembangan kurikulum dilaksanakan melalui kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan atau organisasi yang menyediakan pelatihan. Pelatihan ini dirancang agar guru dapat menerapkan metode pengajaran yang inklusif, memanfaatkan teknologi, serta memahami kurikulum berbasis kompetensi. Setelah pelatihan, guru diharapkan dapat menerapkan teknik pengajaran yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa. Sejauh ini program pelatihan guru telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelatihan dan keterbatasan jumlah pelatih dibandingkan dengan banyaknya guru yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Untuk mengatasi hal ini menurut Abdullah, A. A, beberapa program pelatihan berbasis daring telah diimplementasikan untuk memperluas jangkauan program, (Abdullah et al., 2023).

## Simpulan

Kebijakan beasiswa dan subsidi pendidikan yang ditawarkan oleh DKJ, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dengan memberi siswa kurang mampu akses lebih baik ke Pendidikan. Namun, tantangan seperti penyalahgunaan dana dan distribusi yang tidak sesuai dengan tujuan masih perlu ditangani. Keterbatasan pendidikan juga berdampak

pada siswa secara psikologis, seperti rasa rendah diri dan stress, hal ini dapat menghambat keinginan mereka untuk belajar dan memperkuat siklus kemiskinan. Lalu, Pengembangan kurikulum dan pelatihan guru adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak ini. Ini akan meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan pemerataan pendidikan hingga daerah pinggiran. Metode yang mengutamakan kelompok yang rentan ini, menurut teori keadilan sosial Rawls, menunjukkan betapa pentingnya memberikan distribusi sumber daya yang adil untuk memastikan akses pendidikan yang setara. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan pemerintah DKJ telah menghasilkan peningkatan yang signifikan, implementasi dan evaluasi kebijakan tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dampaknya.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, A. A., Ahid, N., Fawzi, T., & Muhtadin, M. A. (2023). Peran guru dalam pengembangan kurikulum pembelajaran. . *Tsaqofah*, 3(1), 23–38.
- Abrar, M. (2023). *Menilik Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Kumparan.Com.
- Amadi, T. S. (2012). *Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat*.
- Amelia, C. (2019). *Problematika pendidikan di Indonesia*.
- Andari, I. A. M. Y., Wiguna, I. B. A. A., & Puspawati, S. (2023). Kontribusi Latar Belakang Pendidikan Terhadap Perkembangan Ekonomi Keluarga (Analisis Kritis). . *Waisya: Jurnal Ekonomi Hindu*, 2(1), 60–74.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. . *Foundasia*, 13(1), 1–15.
- Bagonza, G. , K. Y. T., & Itaaga, N. (2022). The Challenge of Inequality in University Education: Is the District Quota Scheme Addressing Socio-Economic Disparities in Access to University Education in Uganda?. *International Journal of Higher Education*, 11(3), 110–120.
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *URNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(3), 317–326.
- Fadhurrahman, M. N., & Alfiansyah, S. (2024). TANTANGAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN AKAN PENTINGNYA PENDIDIKAN DI ERA SAAT INI. . *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 4(7), 17–24.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). . *Jurnal Konstitusi.*, 6(1), 135–149.
- Freeman, S. (2003). *The Cambridge Companion to Rawls*. . Cambridge University Press.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa.*, 1(2), 90–100.
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-Level bureaucracy and public accountability. . *Public Administration.*, 85(2), 279–299.

- Juventia, D., & Yuan, S. A. (2024). Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 418–427.
- Martono, N., Puspitasari, E., & Wardiyono, F. X. (2018). Kematian sekolah swasta. . *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Muluk, A. P., Irbah, A., Bagastama, R. M., & Belakang, L. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di DKI Jakarta. *Ilmu Pemerintahan Unbraw*.
- Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. . *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.*, 8(2), 46–56.
- Ngaba, A. L. (2017). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah. . *JMSP (Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan)*, 1(3), 254–261.
- Nurdin, A. (2019). Implementasi dana Kartu Jakarta Pintar (KJP)(sebuah analisis kebijakan pendidikan). . *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(1), 49–62.
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). . *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 110–117.
- Rahman, Md. (n.d.). he Role of Education in Reducing Poverty and Social Inequality. *International Journal of Science and Research (IJSR)*.
- Saprianto, R., Simbolon, T. R., & Hukom, A. (2023). Implikasi Otonomi Daerah Pada Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia. . *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Pariwisata.*, 3(2), 68–84.
- Sembiring, C., Masinambow, V. A., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota-Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 25–36.
- Sirait, J. E., & Leorince, L. (2024). INSTITUSI PENDIDIKAN KRISTEN SEBAGAI PILAR KEMERDEKAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Diegesis: Jurnal Teologi*, 9(2), 207–231.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(9), 340.
- Susianita, R. A., & Riani, L. P. (2024). Pendidikan Sebagai Kunci Utama Dalam Mempersiapkan Generasi Muda Ke Dunia Kerja Di Era Globalisasi. *Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 1–12.
- Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy implementation, street-level bureaucracy, and the importance of discretion. *Public Management Review*, 16(4), 527–547.
- Yuan, D. J. S. A. (n.d.). *Ketimpangan Sosial Dalam Bidang Pendidikan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*.